



## Respon Uni Eropa terhadap Ancaman Human Security atas Kasus Kematian Mahsa Amini di Iran

Sarah Razita<sup>1</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 17 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

*Human security is an issue that has recently become a hot topic of discussion among international relations scientists. This issue resurfaced after the incident that killed Mahsa Amini, an Iranian civilian who died because of the violence of the state apparatus in Iran. This event has also attracted the attention of many parties, including the European Union. The European Union views the actions taken by the Iranian authorities as very arrogant. The European Union also condemned Iran.*

**Keywords:** *Human Security, Feminism, Human Rights, Abuse of Power*

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Razita, S. (2025). Respon Uni Eropa terhadap Ancaman Human Security atas Kasus Kematian Mahsa Amini di Iran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.A), 162-171. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11848>.

---

### INTRODUCTION

Dalam perkembangan Hubungan Internasional, aktor-aktor tak lagi hanya terletak pada negara, melainkan aktor non state pun juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam skema politik internasional. Aktivitas-aktivitas politik tidak lagi bermain pada arena domestik semata, melainkan ada peran yang dimainkan oleh aktor lain secara internasional (Barkin, 2006). Tidak heran bila Kerja sama internasional atau organisasi internasional semakin meningkatkan dampak pada dinamika isu dan politik internasional. Uni Eropa (UE) atau The European Union (EU) adalah suatu kerja sama ekonomi dan politik antara 27 negara-negara Eropa yang beroperasi dalam market internal atau Single Market barang, jasa, dan SDM antar negara anggota. (ec.europa.eu, 2021). Titik awal untuk laporan ini adalah Strategi Keamanan Eropa (European Security Strategy/ESS) yang disetujui oleh Dewan Eropa pada bulan Desember 2003. ESS menjadikan tanggung jawab Eropa untuk keamanan global sebagai inti dari strategi keamanan Eropa. Ini menunjukkan bahwa 'posting' lingkungan Perang Dingin adalah salah satu perbatasan yang semakin terbuka di mana aspek keamanan internal dan eksternal saling terkait'. ESS membuat kasus untuk keterlibatan preventif, strategi multilateralisme yang efektif dan untuk perluasan aturan hukum internasional. Ia berpendapat bahwa Uni Eropa perlu 'lebih aktif' dan 'lebih mampu'.

Laporan ini tentang bagaimana membuat Uni Eropa lebih mampu. Pendekatannya adalah 'bottom-up', artinya, berkaitan dengan bagaimana meningkatkan keamanan individu manusia di berbagai belahan dunia. Laporan tersebut menguraikan baik seperangkat prinsip di mana kebijakan keamanan Eropa harus dibangun, dan kemampuan yang dibutuhkannya untuk memberikan kontribusi yang kredibel bagi keamanan global, yang bergantung pada keamanan Eropa itu sendiri. Akibatnya, ia mengusulkan doktrin baru untuk implementasi

Strategi Keamanan Eropa. Laporan tersebut berfokus pada kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi situasi ketidakamanan fisik yang parah, 'kebebasan dari rasa takut', daripada seluruh jajaran kemungkinan dan instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan Eropa Uni Eropa dalam menjalankan kegiatannya, menggunakan tiga pilar sesuai Traktat Maastricht dari tahun 1992. Traktat ini membagi pilar atau bidang yang dilakukan Uni Eropa dalam kegiatannya. Pilar ini terdiri dari masyarakat Eropa, politik luar negeri, peradilan dan dalam negeri (secara formal polisi dan kerjasama judisial dalam permasalahan kriminal). Dalam traktat-traktat pendirian Uni Eropa yang menjadi landasan pendirian Uni Eropa dan Piagam Hak Asasi Uni Eropa, dan dalam konvensi Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia, pelarangan diskriminasi merupakan asas pokok. Pemberantasan semua bentuk diskriminasi didefinisikan pula sebagai salah satu prioritas Uni Eropa dalam Kerangka Strategis tentang Hak Asasi Manusia Uni Eropa tahun 2012. Pedoman Hak Asasi Manusia Uni Eropa tentang Nondiskriminasi ini merupakan pelaksanaan Rencana Tindak Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dan pada saat yang bersamaan melengkapi instrumen-instrumen operasional Komisi Eropa untuk kerja sama pembangunan dalam konteks “Pendekatan hak asasi dari Uni Eropa dalam Kerja Sama Pembangunan – yang mencakup semua hak asasi manusia” (RBA). (EU Human Rights Guidelines on Non-discrimination in External Action, 2019).

Di kehidupan modern, konsep gerakan Feminisme sangat ental mewarnai aksi perjuangan yang dilaukan ditengah-tengah tidak adanya keadilan dan kesetaraan gender. Feminisme hadir sebagai kritik karena peran perempuan yang dibatasi geraknya, akibat pengaruh dari besarnya pembangunan yang dilakukan oleh kaum pria. Teori feminis menunjukkan bahwa kekerasan saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Feminis hadir untuk melindungi hak keselamatan bagi tai individu dan masyarakat. Pendekatan feminis menekankan bahwa kekerasan struktural yang mencegah individu menyadari dan membebaskan diri juga menyebabkan rasa tidak aman. Ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik merupakan kekerasan struktural. Mereka juga menyatakan bahwa untuk keamanan yang komprehensif, struktur yang akan menciptakan peluang yang sama di antara individu harus diciptakan. Dengan pendekatan ini, mereka menunjukkan bahwa keamanan harus lengkap.

Dalam konteks global baru, kebijakan keamanan Uni Eropa harus dibangun di atas keamanan manusia, bukan keamanan negara. Keamanan manusia berarti kebebasan individu dari ketidakamanan dasar. Genosida, penyiksaan yang meluas atau sistematis, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, penghilangan, perbudakan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat hukum perang sebagaimana didefinisikan dalam the Statute of the International Criminal Court (ICC) adalah bentuk ketidakamanan yang tidak dapat ditoleransi yang melanggar keamanan manusia. Pelanggaran besar-besaran atas hak atas pangan, kesehatan dan perumahan juga dapat dipertimbangkan dalam kategori ini, meskipun status hukum mereka kurang ditinggikan. Pendekatan keamanan manusia untuk Uni Eropa berarti bahwa itu harus berkontribusi pada perlindungan setiap individu manusia dan tidak hanya pada pertahanan perbatasan Uni, seperti pendekatan keamanan negara bangsa (A Human Security, 2019).

## METHODS

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah ulasan literatur; Kronologis dan Cakupan. Tinjauan literatur cakupan digunakan untuk mengidentifikasi ruang lingkup atau cakupan badan literatur pada topik tertentu. Tinjauan literatur kronologis melihat perkembangan topik atau ide tertentu dari waktu ke waktu.

Keamanan adalah hak multifaset dari semua orang dan melibatkan semua aspek aktivitas manusia. Sama seperti kesehatan pribadi dimana melibatkan bagaimana kita tidur, makan, dan berinteraksi satu sama lain, seperti halnya tubuh kita adalah sistem yang terintegrasi, demikian juga keamanan kita. Keamanan manusia sebagai prinsip integral yang diserukan saat ini.

Keamanan (Security) merupakan hal yang sangat melekat bagi setiap manusia. Pada dasarnya, keamanan merupakan kemampuan untuk mempertahankan diri dari segala bentuk ancaman. Keamanan dalam arti objektif, mengukur tidak adanya ancaman terhadap nilai yang diperoleh, dalam pengertian subjektif, tidak adanya rasa takut bahwa nilai-nilai akan diserang (Buzan, 1991:4). Gagasan Human Security menjadi perbincangan hangat. Banyaknya isu kekerasan dengan berlandaskan peraturan negara semakin meningkat. Negara menggunakan kuasanya untuk melakukan kekerasan yang berujung pada kematian. Peran negara yang terlalu dominan dalam menentukan kebijakan, membuat banyak kebijakan yang disalahgunakan (Abuse of power). Kekerasan oleh negara yang terjadi beberapa waktu lalu, membuat gagasan Human Security menjadi gagasan kembali. Mengingat perlindungan setiap manusia merupakan hak asasi manusia (HAM).

Keamanan manusia dimulai dengan premis bahwa realitas alam harus menjadi dasar pengerjaan kita, bukan hanya berfokus pada institusi buatan manusia. Keamanan manusia berakar pada ilmu pengetahuan terbaik dan mengakui bahwa manusia adalah entitas sosial yang membutuhkan makna dan nilai dalam upaya mereka. Manusia membutuhkan lingkungan yang memungkinkan untuk tumbuh dalam nilai-nilai kita yang paling memuliakan. Dengan demikian, kebijakan untuk memenuhi kebutuhan keamanan manusia secara tepat harus praktis dan koheren secara moral. Koherensi moral membutuhkan pendekatan damai di antara orang-orang dan bangsa, dan pengakuan yang tepat akan kebutuhan harmoni banyak budaya serta banyak spesies. (ginstitute.org, 2022).

Analisa feminis mengenai Human security lebih mendalam dibanding merujuk pada keamanan dari negara terhadap masyarakat. Kelompok feminis menekankan perlunya memberi perhatian terhadap para korban agar mendapatkan pemahaman bagaimana para aktor tersebut menjadi ancaman. Pendekatan feminis secara jelas berbagi pemahaman dengan kerangka studi alternatif yang muncul dalam dua dekade terakhir. Feminists berkomitmen terhadap tujuan emansipatori untuk mengakhiri subordinasi perempuan konsisten dengan defenisi keamanan yang mengacu pada individu, posisi dalam struktur sosial yang lebih luas, sebagai awal poinnya. (Tickner, 2001).

## RESULTS & DISCUSSION

### *Results*

#### ***Ancaman Human Security terhadap Kematian Mahsa Amini***

Mahsa Amini adalah seorang wanita berusia 22 Tahun dari Saqqez, Kurdistan, Iran. yang telah meninggal pada Jumat, 16 September 2022 silam pasca

ditahan oleh polisi moralitas negara tersebut 3 hari sebelum kematiannya karena diduga telah melanggar aturan berpakaian wanita di Iran yang diberlakukan secara ketat. Polisi moralitas mengatakan dia mengenakan jilbabnya dengan terlalu longgar (Suara.com, 2022). Iran secara resmi mengesahkan dalam hukum negaranya untuk mewajibkan perempuan mengenakan jilbab menutupi rambut mereka sepenuhnya sejak 1979, walau dalam prakteknya hal ini belum banyak ditegakkan dalam beberapa tahun terakhir, sampai akhirnya Ebrahim Raisi resmi menjadi presiden pada 2021. Awal peristiwa terjadi saat Mahsa Amini mengunjungi ibu kota Teheran bersama keluarganya. Kemudian, ditangkap oleh polisi moralitas dan dibawa ke pusat penahanan untuk "dididik". Saksi mata di sekitar melaporkan bahwa petugas memukuli kepala Amini dengan tongkat dan membenturkan kepalanya ke salah satu kendaraan mereka, bahkan selama di dalam van pun terdapat beberapa laporan yang menyatakan bahwa ia masih dipukuli. (Harpers Bazaar, 2022). Saudara laki-laki Amini yang saat itu berada bersamanya saat ia ditangkap diberitahu bahwa Amini akan dibawa ke pusat penahanan dan dibebaskan tak lama kemudian. Namun, Amini justru tiba di Rumah Sakit Kasra, di mana ia meninggal setelah koma selama tiga hari. Rumah sakit mengklaim bahwa Amini mati otak pada saat kedatangan, dikutip dari unggahan instagram yang kini telah dihapus.

Pasukan keamanan Iran mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa Amini tiba-tiba pingsan karena serangan jantung saat sedang dilatih tentang aturan jilbab di sebuah pusat penahanan. Keluarganya membantah tuduhan ini dan mengatakan dia dalam keadaan sehat sebelum penangkapannya. Saudaranya, Kirash Amini, mengatakan dia sedang menunggu di luar penjara pada hari penangkapannya ketika dia mendengar teriakan datang dari dalam dengan seorang saksi yang berlari keluar mengatakan bahwa pasukan keamanan telah membunuh seseorang. Foto dan video Mahsa Amini yang viral di media sosial pada 15 September menunjukkan dia terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit dengan selang di mulut dan hidungnya. Darah menyembur keluar dari telinganya dan dia memiliki memar di sekitar matanya. Beberapa dokter Iran mengatakan di Twitter bahwa mereka tidak dapat mengakses catatan medisnya, tetapi pendarahan dari telinganya menunjukkan bahwa dia mengalami gegar otak akibat cedera kepala yang tentunya dibantah oleh pihak kepolisian dengan mengeluarkan statement yang menyatakan Amini meninggal karena penyakit bawaan (kompas.com, 2022).

Kasus ini tentunya menandai adanya ancaman Human Security atau keamanan manusia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh UNDP bahwa keamanan manusia harus memberikan jaminan pada manusia menyangkut hak dasarnya untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupannya (Haq, 1994). Hak dasar manusia atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi (United Nations, n.d.). Berdasarkan pernyataan dari PBB mengenai hak dasar manusia, pemerintah Iran tentu telah melanggar dan mencederai hak asasi manusia Mahsa Amini, bahkan bukan hanya Amini namun juga seluruh kelompok

wanita di negara tersebut. Mereka merenggut hak hidup dan hak kebebasan dari penyiksaan ataupun berekspresi para wanita di Iran dengan menerapkan kebijakan yang terkesan menekan kaum wanita.

### ***Respon Publik atas Kematian Amini***

Setelah berita tentang kematian Amini mulai mencuat, tentunya memicu kemarahan luas dari masyarakat. Banyak yang mengutuk praktik kekerasan dan menyerukan diakhirinya pelecehan ataupun penahanan terhadap perempuan yang tidak mengikuti aturan hijab. Demonstrasi setelah kematian Amini dimulai pada 17 September 2022 dan telah menyebar ke lebih dari 80 kota di Iran. Sebagian besar aksi unjuk rasa berpusat di antara para penduduk Kurdi di barat laut Iran. Kelompok hak asasi manusia menyatakan sedikitnya 31 warga sipil tewas dalam kerusuhan itu, sementara televisi pemerintah menyebutkan jumlah korban tewas 17 orang. Di Teheran dan beberapa kota Kurdi, para demonstran membakar kantor polisi dan kendaraan. Demonstrasi seputar kematian Amini adalah yang terbesar di negara itu sejak protes terhadap kenaikan harga bahan bakar pemerintah. Sebuah video yang telah beredar di seluruh dunia menunjukkan beberapa wanita merobek jilbab mereka sebagai protes, memotong rambut mereka sambil bersorak sorai dan melemparkan jilbabnya ke kobaran api unggun (kompas.com, 2022). Aksi protes 5 hari yang tadinya dimulai dari seluruh penjuru negri itu, kini pun mulai tersebar luas secara Global. Berawal dari hashtag #mashaamini yang trending di Twitter dengan lebih dari 1 juta cuitan dan aksi protes yang ditunjukkan oleh masyarakat dunia secara online dengan memposting video mereka memotong rambutnya sebagai bentuk solidaritas terhadap protes yang sedang terjadi di Iran. Kini telah sampai pada aksi protes secara langsung di beberapa negara seperti di Paris, Prancis. London, Inggris. dan masih banyak lainnya (detik.com, 2022).

Aktivis-aktivis perempuan banyak menyuarakan penentangannya terhadap kebijakan pemerintah yang memojokkan wanita dan penganiyaan terhadap hak-hak wanita. Menurut Nur Azizah dalam bukunya mengatakan bahwa feminisme adalah sebuah pemikiran yang mengakui adanya subordinasi yang dialami oleh perempuan, dari perilaku ini yang kemudian memunculkan suatu usaha atau jalan keluar untuk mengakhirinya (Azizah, 2017). Ani Soetjipto dalam bukunya juga menjelaskan bahwa feminisme adalah suatu gerakan politik dengan pokok bahasan utamanya adalah hak hak perempuan dan emansipasi gender (Soetjipto & Trimayuni, 2013). Melalui pandangan dari kedua penulis tersebut dengan ini dapat ditarik bahwa konstruksi gender pada perempuan yang timpang menjadi penting, karena keadaan ini terjadi di berbagai kebudayaan dunia. Dimana perempuan sering mendapatkan posisi yang tidak diuntungkan terutama di negara Iran sendiri yang menganut hukum Islam. Kekuatan ulama di Iran tercipta karena dijadikannya sistem Velayat el- Faqeh sebagai landasan ideologis dalam kehidupan bernegara. Sistem ini adalah sistem yang menekankan kepemimpinan dibawah tangan para ulama, dianggap demikian karena sistem ini adalah sistem yang lahir dari sintesa ajaran Syiah Imam Kedua Belas, ajaran yang menganggap bentuk keimamahan adalah bentuk pemerintahan penerus kenabian (Usman, 2017). Dari sini dapat disimpulkan mengapa kehadiran para ulama dan hukum syariahnya sangatlah mutlak, sehingga hak-hak perempuan pun kerap kali diabaikan karena segala sesuatunya berada di tangan tafsiran ulama atas kitab suci yang merasa

bahwa tindakan kekerasan pada perempuan karena pelanggaran pada “urusan keagamaannya” adalah sesuatu yang wajar dan boleh dilakukan. Atas hal ini para aktivis perempuan di Iran dan gerakan feminisme menyebar luas di negara tersebut.

Tak hanya masyarakat biasa, kasus ini juga telah memicu amarah dan menjadi perhatian khusus para pejabat negara serta organisasi organisasi lainnya seperti PBB. Pemerintahan US, Prancis, Inggris, Canada, serta Uni Eropa dan masih banyak lagi telah bersuara mengenai kematian Mahsa Amini (United States Institute of Peace, 2022).

### ***Discussion***

#### ***Respon Uni Eropa terhadap Kematian Mahsa Amini***

Tindakan keras Iran terhadap para pengunjuk rasa, jurnalis, dan para aktivis telah menambahkan kecaman dari yang sebelumnya sudah menjadi isu hangat di lingkup global. Enam negara anggota Uni Eropa telah sepakat akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran setelah tindakan keras Iran terhadap para pengunjuk rasa yang memperjuangkan keadilan untuk kematian Mahsa Amini. Jerman, Italia, Republik Ceko, Prancis, Denmark dan Spanyol sepakat untuk mengajukan proposal sanksi baru Uni Eropa terhadap Iran. Sanksi yang diusulkan menargetkan 16 individu, organisasi serta lembaga utama yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan keras terhadap protes nasional di Iran dalam beberapa bulan terakhir. Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa, Josep Borell mengeluarkan statement yang mendesak pihak pemerintah Iran untuk mengusut tuntas dengan bijak segala kerusuhan yang sedang terjadi di Iran pasca kematian Amini dan kematian Mahsa Amini itu sendiri. Seperti yang ia katakan, “Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mendesak pihak berwenang Iran untuk secara ketat mematuhi prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, di mana Iran adalah salah satu pihak. Oleh karena itu, kami mengharapkan Iran untuk segera menghentikan tindakan keras terhadap protes dan memastikan akses internet, serta arus informasi yang bebas. Lebih jauh lagi, kami mengharapkan Iran untuk mengklarifikasi jumlah kematian dan penangkapan, membebaskan semua demonstran tanpa kekerasan dan memberikan proses hukum kepada semua tahanan. Selain itu, pembunuhan Mahsa Amini harus diselidiki dengan sepatutnya dan siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas kematiannya harus dimintai pertanggungjawaban. Kami memperhatikan pernyataan Presiden Iran dalam hal itu.” “Uni Eropa akan terus mempertimbangkan semua opsi yang tersedia menjelang Dewan Urusan Luar Negeri berikutnya, untuk mengatasi pembunuhan Mahsa Amini dan cara pasukan keamanan Iran menanggapi demonstrasi berikutnya.” ujar Borell dalam pidatonya pada tanggal 4 Oktober 2022 (United States Institute of Peace, 2022).

Presiden Prancis, Emmanuel Macron pun turut mengecam Iran dan menuntut adanya transparansi dalam investigasi. “Investigasi yang transparan harus dilakukan sesegera mungkin untuk menjelaskan keadaan tragedi ini. Prancis menegaskan kembali komitmennya yang konsisten dan teguh untuk memerangi dan menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Kami akan terus mengadvokasi universalisasi Konvensi Istanbul Dewan Eropa, yang merupakan instrumen internasional paling maju yang ada dalam perang melawan kekerasan terhadap perempuan”. Ia juga mengucapkan bela sungkawa teruntuk keluarga korban (United States Institute of Peace, 2022).

Annalena Baerbock selaku menteri luar negeri Jerman pun menyatakan statement yang serupa di mana ia berusaha untuk menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan pada Iran. “Saya melakukan semua yang saya bisa di dalam E.U. kerangka kerja bahwa kita dapat mulai menjatuhkan sanksi, terutama sekarang, sementara kita terus bernegosiasi tentang JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka di Iran yang dengan kejam memukuli perempuan sampai mati atas nama agama, menembak mati pengunjung rasa.” Dia mengatakan tindakan keras Iran terhadap protes di Teheran adalah cerminan dari ketakutan rezim Iran terhadap pendidikan dan kebebasan. Menurut Baerbock, para demonstran harus dibantu agar suara mereka didengar dan rezim Iran harus diberi sanksi. Namun, sampai saat ini belum ada rincian spesifik mengenai sanksi yang mungkin dikenakan, tetapi kantor berita AFP dan EFE mengatakan bahwa kesepakatan telah dicapai di antara para diplomat UE dan akan diratifikasi pada pertemuan menteri luar negeri berikutnya yang akan diadakan di Luksemburg pada hari Senin. Menteri luar negeri Uni Eropa menyatakan bahwa UE akan memutuskan sanksi tersebut pada tanggal 17 Oktober dan diharapkan untuk tidak adanya perlawanan dari anggota blok (United States Institute of Peace, 2022)

Uni Eropa memiliki tekad bersama untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini mendukung semua aspek kebijakan internal dan eksternal dari Uni Eropa. Konsistensi mereka dalam menangani dan mempromosikan isu HAM ini pun dapat dilihat dari instrumen untuk Hak Asasi Manusia yaitu The European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007, dan bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan dan konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum, dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental (Prakoso, 2016).

Baru-baru ini Uni Eropa juga mengadopsi keputusan dan peraturan yang menetapkan rezim sanksi hak asasi manusia global. Untuk pertama kalinya, Uni Eropa melengkapi dirinya dengan kerangka kerja yang memungkinkannya menargetkan individu, entitas, dan badan – termasuk aktor negara dan non-negara – yang bertanggung jawab, terlibat dalam, atau terkait dengan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia serius di seluruh dunia, tidak peduli di mana mereka terjadi. Tindakan pembatasan tersebut akan memberikan larangan perjalanan yang berlaku untuk individu, dan pembekuan dana yang berlaku untuk individu dan entitas. Selain itu, orang dan entitas di EU akan dilarang menyediakan dana bagi mereka yang terdaftar sebagai pelanggar HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka kerja untuk tindakan pembatasan yang ditargetkan berlaku untuk tindakan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya (misalnya penyiksaan, perbudakan, pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan atau penahanan sewenang-wenang). Pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya juga dapat berada di bawah lingkup rezim sanksi di mana pelanggaran atau pelanggaran tersebut tersebar luas, sistematis atau menjadi perhatian serius sehubungan dengan tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama yang ditetapkan dalam Perjanjian (Pasal 21 TEU). Sebelum ini Uni Eropa telah memiliki mekanisme sanksi hak asasi manusia namun, secara geografis terbatas dalam ruang lingkup untuk masing-masing negara. Kini dengan disahkannya EUGHRSA atau The EU

Global Human Rights Sanctions Regime penetapan sanksi tidak lagi memerlukan kerangka hukum terpisah dan keputusan Dewan dari setiap negara untuk menambahkan orang atau entitas baru ke daftar sanksi UE. Adapun bentuk-bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diberi sanksi menurut EU adalah sebagai berikut:

- Genosida;
- Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
- Perbudakan;
- Eksekusi dan pembunuhan di luar proses hukum, ringkasan, atau sewenang-wenang;
- Penghilangan orang secara paksa, penangkapan atau penahanan sewenang-wenang

Bukan hanya sebatas itu, tindakan pelanggaran lainnya yang lebih luas pun juga dapat termasuk, seperti perdagangan manusia, Pelanggaran hak asasi manusia oleh penyelundup migran, Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, Pelanggaran atas kebebasan dan kedamaian individu, serta kebebasan berekspresi dan agama (European Council, 2020). Tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang di Iran tentunya melanggar hak asasi manusia dan termasuk pada tindakan yang dapat diberikan sanksi oleh Uni Eropa bila dirujuk dari EUGHRSR karena telah memenuhi beberapa poin, seperti poin ketiga mengenai penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, penangkapan, eksekusi dan pembunuhan sewenang-wenang. Melihat dari respon Uni Eropa pada kasus pelanggaran HAM serupa yang terjadi di Belarus sebelumnya, maka kemungkinan besar sanksi yang akan diberikan pada Iran pun tak akan berbeda jauh. Sebelumnya Uni Eropa turut menanggapi pelanggaran rezim Presiden Lukashenko dengan memberi tindakan pembatasan berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, serta embargo senjata yang tentunya merugikan skema kegiatan ekspor-impor negara (Prakoso, 2016)

## CONCLUSION

Perlindungan dan jaminan atas keamanan setiap manusia bagi sebuah negara adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Ini juga yang menjadi tolak ukur bagi dunia internasional apakah sebuah negara sudah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia atau bahkan membiarkan pelanggaran terjadi di negaranya. Kasus kematian Mahsa Amini menjadi pembelajaran bagi dunia internasional. Kasus Kematian Mahsa Amini memperlihatkan kepada dunia bahwasanya perlindungan dan jaminan atas keamanan manusia. Ini menjadi preseden yang buruk, karena kematian tersebut dilakukan oleh aparat keamanan.

Dengan paparan diatas dapat kita katakan bahwa persoalan keamanan manusia dalam kaitannya dengan media dan negara demokrasi akan selalu menempatkan apakah negara dalam kondisi demokrasi, transisia atautkah otoriter. Jika negara transisional, maka masyarakat akan cenderung melakukan aktivitas yang menuju pada anarkhi dan terorisme, sementara jika negara demokratis, masyarakat akan cenderung berperilaku santun dan beradab. benar-benar Sedangkan ketika negara otoriter, masyarakat akan cenderung keras dan melakukan

perlawanan sekalipun negara memposisikan dirinya sebagai negara kuat. Media sangat berperan dalam perspektif human security karena memberikan kontribusi yang jelas atas terjadinya konstruksi masyarakat dan negara, apakah negara kuat ataukah negara lemah. Media sangat berpengaruh dalam kajian keamanan manusia karena memiliki berbagai kepentingan, ekonomi, politik, dan kebudayaan.

#### CONFLICT OF INTEREST

Terkait dengan penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki potensi konflik kepentingan.

#### ACKNOWLEDGEMENT

Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dosen pembimbing untuk penulisan penelitian jurnal ini, Ma'am Prilla Marsingga S.Sos., M.I.Pol. serta untuk kontribusinya sebagai pakar dalam studi ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri atas kerja kerasnya dalam menulis jurnal ini.

#### REFERENCES

- Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis ?* Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
- detik.com. (2022, September 24). *detik.com*. Retrieved from Aksi Protes Kematian Mahsa Amini di Iran, 50 Orang Dilaporkan Tewas: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6309713/aksi-protes-kematian-mahsa-amini-di-iran-50-orang-dilaporkan-tewas>
- European Council. (2020, December 7). *Press release Council of the EU*. Retrieved from EU adopts a global human rights sanctions regime: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/>
- Haq, M. U. (1994). *new imperatives of human security*. Canada.
- Harpers Bazaar. (2022, September 21). *Harpers Bazaar*. Retrieved from What happened to Mahsa Amini?: <https://www.harpersbazaar.com/uk/culture/culture-news/a41294323/what-happened-to-mahsa-amini/>
- kompas.com. (2022, September 22). *kompas.com*. Retrieved from Aksi Protes Wanita Iran Imbas dari Kematian Mahsa Amini, Potong Rambut dan Lempar Jilbab ke Dalam Api: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/22/143000365/aksi-protes-wanita-iran-imbasi-dari-kematian-mahsa-amini-potong-rambut-dan-lempar-jilbab-ke-dalam-api>
- kompas.com. (2022, September 26). *kompas.com*. Retrieved from Buntut Kematian Mahsa Amini, Muncul Desakan Diakhirinya Wajib Berjilbab di Iran: <https://www.kompas.com/global/read/2022/09/26/172800770/buntut-kematian-mahsa-amini-muncul-desakan-diakhirinya-wajib-berjilbab-di-iran>
- Prakoso, M. A. (2016). *KEBIJAKAN UNI EROPA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI BELARUS TAHUN 2006-2014*. *Jurusan Hubungan Internasional*.
- Soetjipto, A., & Trimayuni, P. (2013). *Gender dan hubungan internasional : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Suara.com. (2022, September 24). *suara.com*. Retrieved from Siapa Mahsa Amini, Penyebab Warga Iran Demo Sampai Lepas Hijab: <https://www.suara.com/news/2022/09/24/151022/siapa-mahsa-amini-penyebab-warga-iran-demo-sampai-lepas-hijab>
- United Nations. (n.d.). *United Nations*. Retrieved from Human Rights: <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights#:~:text=Human%20rights%20include%20the%20right,to%20these%20rights%2C%20without%20discrimination>.
- United States Institute of Peace. (2022, Oktober 21). *The Iran Primer*. Retrieved from World Leaders on Mahsa Amini's Death and Protests: <https://iranprimer.usip.org/blog/2022/sep/28/world-reaction-mahsa-amini%E2%80%99s-death>
- Usman. (2017). ULAMA DALAM KONSTITUSI NEGARA IMAMAH. *Jurnal Studi Islam*.